FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMASARAN KERAJINAN BATIK DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pemasaran Kerajinan Batik dan Penyerapan Tenaga Kerja di Mirota Batik Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Disusun Oleh:

LERY JUGEPA

07521887

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA"APMD"
YOGYAKARTA
2016

FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMASARAN KERAJINAN BATIK DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pemasaran Kerajinan Batik dan Penyerapan Tenaga Kerja di Mirota Batik Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Disusun Oleh:

LERY JUGEPA

07521887

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA"APMD"
YOGYAKARTA
2016

APMD SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA YOGYAKARTA

FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMASARAN KERAJINAN BATIK DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pemasaran Kerajinan Batik dan Penyerapan Tenaga Kerja di Mirota Batik Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai derajat kesarjanaan Strata Satu Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

LERY JUGEPA

07521887

ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2016

APMD SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dan disyahkan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Pada hari : Senin

Tanggal : 20 Oktober 2016

Pukul : 13.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Sri Utami, M.Si Ketua/Pembimbing Skripsi	
2. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si Penguji Samping I	
3. Utami Sulistiana, S.P, M.P Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S. Ip., M.A.

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yesus Kristus sumber pengharapan dan hidup yang memberikan segalanya, oleh karenaNya ku persembahkan syukur atas berkat dan rahmatNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
2. Kepada Ayahanda Esly Parir dan Ibunda Yani yang telah mendidik dan tidak henti-hentinya memberikan semangat, serta selalu bersabar selama aku menempuh pendidikan di Yogyakarta ku ucapkan terima kasih atas semua yang telah kalian berikan.
3. Buat Nenek Ribka yang selalu mendoakan ku, tiada kata lain yang dapat ku ucapkan selain kata terima kasih dan doa agar nenek slalu sehat.
4. Buat Adik Yemy Quariliani, Lango' Jekson Sihotang, Adik Marsix Andry terima kasih atas segala dorongan motivasi yang telah kalian berikan.
5. Buat Pengurus dan Anggota Persekutuan Dayak lundayeh (PDL) Cab. Yogyakarta, "Ferurum, Fekimet, Fekuyut, Feribatun Ngeneu' do' bawang tew".
6. Buat kawan-kawan seperjuanganku, Jery Manuel, Liberto Een, Fornestor Mindaw, Hilarius Budi, Bru banyak hal yang ku dapatkan dari kalian.
7. Buat adik-adik di kusnan Kost Sigar Herianto, Nova Sigar, Adi Ranjaya, Eki Vikram, Yanuarius, Tedi tetap semangat dalam menempuh pendidikan, Terima kasih atas kebersamaan kalian dan maafkan bila ada kesalahan ku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehigga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pemasaran Kerajinan Batik dan Penyerapan Tenaga Kerja". Dengan lokasi penelitian di Mirota Batik Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusun tidak mungkin dapat menyelesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos. Selaku ketua rektorat STPMD "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius sahdan, S.Ip., M.A. Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
3. Ibu, Dra. Sri Utami, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi.
4. Ibu, Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. Selaku Dosen Penguji Samping I.
5. Ibu, Utami Sulistiana, S.P., M.Si. Selaku Dosen Penguji Samping II.
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kepala Disperindakop Kota Madya Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Bapak Hamzah selaku pemilik Mirota Batik Yogyakarta, yang telah mengijinkan melakukan penelitian.
9. Seluruh dosen STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah memberi bimbingan selama di bangku perkuliahan.
10. Seluruh staf dan karyawan/ karyawati STPMD "APMD" Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan manusia adalah terbatas dan karenanya penulis mohon masukan berupa saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat dan dimanfaatkan.

Yogyakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PENGESAHAN……ii
MOTTO……..iii
HALAMAN PERSEMBAHAN……vi
KATA PENGANTAR……v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL.....ix
SINOPSIS……..…….x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah……..1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian……10
D. Manfaat Penelitian……..10
E. Kerangka Teori……10
1. Fasilitasi Pemerintah Daerah……10
2. Tinjauan tentang UMKM……..…12
1.1 Karakteristik UMKM……..13
a. Padat Karya……...13
b. Modal Kecil……14
c. Tekhnologi Sederhana……...14
d. Pemerataan……14
3. Konsep Pemasaran……15
2.1. Bauran pemasaran……..18
2.1.1. Produk……..18
2.1.2. Atribut Produk……19
2.1.3. Harga……19
2.1.4. Tempat……20

2.1.5. Promosi……22
4. Penyerapan Tenaga Kerja……..23
F. Ruang Lingkup Penelitian…….27
1. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pemasaran Kerajinan Batik….27
2. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyerapan Tenaga Kerja……27
G. Metode Penelitian 28
1. Jenis Penelitian 28
2. Unit Analisis 28
3. Teknik Pengumpulan Data..... 29
4. Teknik Analisis Data 30

BAB II PROFIL DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

A. Profil Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi……....32
B. Sejarah Umum Mirota Batik Mirota Batik Yogyakarta.....35
C. Nilai - nilai dalam Budaya Organisasi Mirota Batik.....38
D. Visi Mirota Batik.....38
E. Misi Mirota Batik.....38
F. Filosofi.....38
G. Produk Mirota Batik.....38

BAB III ANALISIS DATA

A. Deskripsi identitas informan secara umum.....56
B. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pemasaran Kerajinan Batik……...59
C. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyerapan Tenaga Kerja……..64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....66

B. Saran.....67

INTERVIEW GUIDE

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Pejabat Disperindagkop

Tabel 2.2 Daftar Karyawan Mirota Batik

Tabel 3.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Jabatan

Tabel 3.2 Deskripsi Informan Berdasarkan Umur

Tabel 3.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SINOPSIS

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Peranan UMKM dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sangat penting. Oleh karena itu pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif artinya Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipergunakan untuk menganalisis pokok permasalahan yang ada dan tidak menguji suatu hipotesis. Unit analisis dalam penelitian ini Kepala Disperindagkop, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Pemilik Kerajinan Batik, Karyawan 15 orang. Teknik Pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pemasaran kerajinan batik dengan Pemerintah daerah juga ikut berperan serta dalam pengadaan produk yang ada di Mirota Batik dengan menghadirkan produk UMKM kecil untuk dijual di Mirota Batik. Serta Fasilitasi Pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja Daerah, dalam yakni tingkat upah yang diberikan oleh Mirota Batik sudah sangat layak dan jauh di atas UMR. Hal ini membuktikan bahwa manajemen sangat komitmen untuk mensejahterakan karyawannya dengan memberikan upah yang bisa untuk menghidupi keluarga karyawan dan Pemerintah daerah ikut memfasilitasi dengan melibatkan UMKM kecil dalam rekruitmen pegawai di Mirota Batik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel. Bukti lain dari peranan strategis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni kemampuan sektor ini menjadi pilar utama ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja dengan penduduk angkatan kerja. Seperti diketahui, bahwa lapangan pekerjaan di perkotaan sebagian besar bergerak di sektor formal, yaitu bidang non agraris yang biasanya membutuhkan tenaga kerja dengan bekal pendidikan yang cukup tinggi. Sisi yang berlawanan, jumlah penduduk angkatan kerja di Indonesia sebagian besar tidak mempunyai bekal pendidikan dan ketrampilan yang cukup tinggi sehingga mereka tidak dapat memenuhi kriteria-kriteria pekerjaan yang tersedia. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan. Sebagai manusia, mereka mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dengan keterbatasan kemampuan yang

ada, mereka berusaha untuk tetap bertahan demi memenuhi kebutuhan hidup. Dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan banyak perusahaan tidak beroperasi lagi seperti sedia kala oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang umumnya bermukim di wilayah perkotaan. Demi mempertahankan hidup, orang-orang yang tidak tertampung dalam sektor formal maupun yang terkena dampak PHK tersebut kemudian masuk ke dalam sektor informal yang menurut banyak ahli sebenarnya menguasai sebagian besar angkatan kerja di kota-kota. Menurut Badan Penanaman Modal Asing, sekitar 70% modal domestik dan 71 modal asing diinvestasikan di kota-kota besar di Indonesia, namun tragisnya industri dan pabrik-pabrik sektor modern yang diharapkan bersifat padat karya dan menyerap tenaga kerja tersebut faktanya bersifat padat modal dan menggunakan teknologi tinggi yang hanya menyerap 10%-16% angkatan kerja terdidik saja (Lincolin, 2004:61).

Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, ketrampilan kurang dan umumnya para pendatang. Sektor informal juga sangat berpengaruh dalam proses percepatan pembangunan ekonomi. Pembanguan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia telah menikmati masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang, hingga datangnya krisis

nilai tukar tereskalasi menjadi krisis multi dimensi yang dimulai akhir tahun 1997. (Tejasari, 2008 : 12).

Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UMKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cendrung bertambah. (Departemen Koperasi, 2008)

Saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. (Departemen Koperasi, 2008).

Adapun alasan-alasan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis yaitu karena: pertama; sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua; sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UMKM. Ketiga; dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya. Sehingga para penganggur tersebut memasuki

sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah UMKM meningkat (Mudrajad, 1999: 13).

Di Indonesia harapan untuk membangkitkan ekonomi rakyat sering kita dengarkan karena pengalaman ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998 usaha kecil telah terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub-sektor kegiatan. Fungsi penyelamatan ini segera terlihat pada sektor-sektor penyediaan kebutuhan pokok rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi. Bukti tersebut paling tidak telah menumbuhkan optimisme baru bagi sebagian besar orang yang menguasai sebagian kecil sumberdaya akan kemampuannya untuk menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi.

Peranan UMKM dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sangat penting. Faktanya terdapat ketidakseimbangan antara sumbangan UMKM dalam penyediaan lapangan kerja dengan kontribusi dalam pembentukan nilai tambah. Pertumbuhan UMKM yang lebih cepat dibandingkan kelompok usaha besar akan memperbaiki struktur usaha dan distribusi pendapatan secara keseluruhan (Ikhsan, 2004: 56).

Selain potensi yang dimiliki UMKM di Daerah istimewa Yogyakarta, ada beberapa keunggulan-keunggulan UMKM dibandingkan dengan usaha besar, yaitu; 1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. 2. Berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian. 3. Kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja. 4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. 5.Terdapat dinamis memanajerial dan peranan kewirausahaan. 6. Dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia. 7. Tersebar dalam

jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif (Azrin, 2004: 10).

Berdasarkan kinerja UMKM di kota Yogyakarta dalam kurun waktu 4 tahun terakhir angka pertumbuhan rata-rata sebesar 2,18% atau menjadi 11.909 unit di tahun 2008. Jadi prospek UKM di kota Yogyakarta sangat menjanjikan karena keberadaannya tidak begitu terpengaruh oleh krisis global yang terjadi pada saat pertengahan tahun yang sama sehingga peluang usaha terbuka lebar dan potensi penyerapan tenaga kerja semakin besar. Hal ini terlihat dari kinerja ekonomi kota Yogyakarta pada tahun 2010 yang mencatat angka pertumbuhan yang sangat besar yaitu sekitar 4,92%. Pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta sangat pesat karena kota Yogyakarta adalah kota pelajar dan kota wisata yang kaya akan keindahan alamnya sehingga bisa menarik turis luar negeri. Hal ini akan membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan UMKM dan peluang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta yang sangat cepat adalah pertumbuhan di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perhotelan, dan restoran serta jasa-jasa, sebagian besar kelompok sektor tersebut adalah UMKM (Partomo,2004:12).

Dengan adanya beberapa nilai positif tersebut, pemerintah mulai untuk mengembangkan industri kecil dengan melakukan beberapa kebijakan untuk memperkuat posisi usaha kecil dan menengah di dalam perdagangan dalam negeri dan internasional agar tidak kalah bersaing dengan Negara lain salah satunya adalah China. Untuk mewujudkan perekonomian yang kokoh, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Sehingga diharapkan dapat menjadi usaha yang tangguh, unggul, dan mandiri. Sehingga peranan dalam mendorong sektor perekonomian semakin meningkat. Di tunjang juga oleh kegiatan pariwisata yang menyediakan kebutuhan para wisatawan, sehingga Industri kecil

tersebut mampu menarik para pengusaha baru untuk menciptakan industri kecil baru. Diharapkan nantinya UMKM tersebut dapat terus tumbuh dan bersaing. Sehingga kedepannya dapat diperoleh perekonomian berasas ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya (Heriyadi, 2012: 9).

Menurut Siagian (1992:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Davey (1998:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama, antara lain *pertama* sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. *Kedua*, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. *Ketiga*, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. *Keempat*, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. *Kelima*, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan

peran pemerintah dalam pengkoordinasiaan, perencanaan, investasi dan tata guna lahan. Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. *Stabilisator*, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

b. *Inovator*, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

c. *Modernisator*, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial,

kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

d. *Pelopor*, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

e. *Pelaksana sendiri*, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Mirota Batik yang dibuka pada tahun 1980, awalnya berkonsep sebagai Malioboro Baru sebagai pasar kecil dengan beberapa kios atau stand. Saat itu, pusat perbelanjaan Malioboro yang ramai masih berada di sekitar toko Ramai dibagian utara, sehingga Malioboro Baru relatif masih sepi. Hamzah sendiri mulai memperkenalkan Mirota Batik hanya dengan menyewa tiga stand yang diisi dengan produk batik dan kerajinan. Usaha ini lambat laun berkembang, Hamzah pun memperbanyak stand yang disewanya. Begitu seterusnya hingga akhirnya Mirota Batik semakin berkibar hingga sekarang.

Mirota Batik juga mengusung konsep kesenian. Oleh karena itu Setiap hari Sabtu, pengunjung disuguhi oleh pertunjukan musik tradisional secara live dengan menggunakan alat musik kecapi. Pengunjung dapat melihat cara membatik sebagai daya tarik budaya yang menyatu dengan konsep wisata belanja yang nyaman. Tata interior Mirota Batik dapat berubah setiap saat tergantung *Visual point* nya. Paparan diatas menunjukkan bahwa mirota batik menyediakan ruang untuk pemasaran kesenian asli Yogyakarta untuk dapat dinikmati oleh para wisatawan baik turis mancanegara maupun turis domestic yang hendak berkunjung ke mirota batik Yogyakarta.

Industri kerajinan memiliki peran dalam perkembangan perekonomian nasional karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah.

Pemerintah selain berperan memberikan kebijakan juga disisi lain harus berperan sebagai fasilitator penyuluhan untuk memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku di sektor industri kecil tersebut. Agar dalam hal ini para sektor industri kecil mampu memberikan inovasi di dalam produk yang mereka hasilkan, dan dapat bersaing dengan industri yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemasaran Kerajinan Batik dan Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Penelitian Kualitatif di Mirota Batik).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemasaran kerajinan batik dan Penyerapan Tenaga Kerja ?”

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2004. "*Ekonomi Pembangunan*".Yogyakarta : STIE YKPN. Bungin, B. 2004.

Azrin.(2004). "*Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Burhan,(2001). "*Metode Penelitian Kualiatif",*Yogyakarta:Penerbit Andi

Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY. 2009. "*Rencana Stratejik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013*", Yogyakarta.

Departemen Koperasi.(2008), "*PDB, Investasi, Tenaga Kerja, Nilai Ekspor UKM di Indonesia*".Jakarta

Fadliilah dkk.2012. "*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil*" . Diponegoro Journal of EconomicsVol. 1. 2012. http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jme. Diakses pada tanggal 5 Februari 2015.

Kuncoro, Mudrajat. 1999. "*Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*". Yoyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Moeleong, Lexy, (2007) "Metode Penelitian Kualitatif ". Bandung : CV Alfabeta

Nasution, Bahtiar. 2003. "*Analisis Omset dan Posisi Bersaing Pada Klaster Usaha Kecil Menengah (UKM) Sepatu Kota Mojokerto*" .Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 3. 2009.

Hardijan.Rusli,(2011)"Hukum Ketenagakerjaan",edisi kedua.Bogor : Ghalia Indonesia

Hadi. 2003.Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Heriyadi (2007), "*Masalah dan Dinamika Usaha Kecil: Studi Empiris Pedagang Klithikan di Alun-alun Selatan Yogyakarta*", Jurnal Ekonomi, Vol. 12 No. 01 Maret 2007, hal. 9 –

Iksan. (2004). "*Usaha Kecil Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi : Berkaca Dari Pengalaman Taiwan*", dalam Jurnal Analisis Sosial Volume 9 No. 2 Agustus 2004.

Partomo.(2004).*"Ekonomi dan skala kecil/menengah dan koperasi"*.Jakarta : Ghalia Indonesia

Payaman (1988). "*Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*". Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.

Kotler, Philip,(2005)."*Manajemen Pemasaran*"jilid 1 dan 2.Jakarta:PT.Indeks Kelompok

Gramedia

Kotler, Philip.2002.”*Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan,Implementasi dan control*”. Jakarta : PT.Prehalindo

Setyadi. (2008). “*Metode Penelitian Bisnis, cetakan kedelapan*”. Bandung: CV. Alfabeta.

Sutrisno, Hadi.(2001).”Metode Penelitian Kualitatif”.Yogyakarta:penerbit Andi

Simamora.Bilson.2001.”*Memenangkan Pasar dengan Pemasaran yang efektif dan Profitable*.Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama

Swasta, Basu.2003.”*Azas-azas marketing*”.Yogyakarta : Liberty

Suparmoko, 2000. “*Pengantar Ekonomi Makro*”, BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tjiptono, Fandi.2005. *“Pemasaran Jasa”*. Malang : Banyumedia

Tejasari, Maharani.(2008), “*Peran sektor usaha kecil dan menengah dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi*”.IPB.Bogor

Tulus T.H. Tambunan, (2002). “*Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia : Beberapa Isu Penting*”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan :

UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 182 tahun 1999 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.